

**Keberpihakan Presiden Prabowo dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) DKI Jakarta 2024 (Analisis *Framing* di Media Indonesia.com)**

Rachmi Kurnia Siregar

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif
Universitas Budi Luhur-Jakarta

Email: rachmi.kurnia@budiluhur.ac.id

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024 menjadi salah satu kontestasi politik yang menarik perhatian masyarakat Indonesia. Pentingnya pesta demokrasi ini tidak hanya tercermin dalam prosesnya, tetapi juga dalam hasil yang menjadi cerminan situasi politik. Pada Pilkada Jakarta 2024, perhatian publik selain tertuju pada kandidat yang maju dalam kontestasi, juga pada dinamika dukungan dari berbagai tokoh politik nasional, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Keberpihakan seorang presiden dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 berpengaruh signifikan terhadap dinamika politik di tingkat daerah dan nasional. Media massa sebagai salah satu ruang utama dalam membentuk opini publik berperan penting dalam menyampaikan dan membingkai informasi terkait keberpihakan Presiden Prabowo di ajang Pilkada DKI Jakarta 2024. Media juga sebagai sarana dalam kontrol sosial politik. Dalam konteks inilah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji enam (6) berita di Media Indonesia.com edisi September- November 2024 terkait keberpihakan Presiden Prabowo pada kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2024 dengan menggunakan analisis *framing* Robert N Entman. Hasil penelitian menunjukkan Media Indonesia.com menempatkan berita dari dua sisi (pro dan kontra) secara proporsional dan mendapatkan porsi pemberitaan yang sama sebagai hasil konstruksi atas suatu realitas sosial. Meski disadari terkait keberpihakan seorang presiden terhadap kandidat tertentu, kehadiran media sesungguhnya dapat memperkuat ataupun melemahkan legitimasi dukungan tersebut. Pilkada DKI Jakarta 2024 secara empiris menjadi barometer dalam pesta demokrasi di level daerah. Lebih dari itu, dukungan Presiden Prabowo Subianto kepada kandidat tertentu merefleksikan Pilkada DKI Jakarta 2024 ‘bercita rasa’ Pemilihan Presiden (Pilpres).

Kata kunci: Analisis *Framing*; Keberpihakan Presiden; *Media Indonesia.com*; Pilgub DKI Jakarta; Presiden Prabowo

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta menjadi salah satu kontestasi politik yang menarik perhatian masyarakat Indonesia. Terutama dalam tahun politik 2024 menjadi tahun perdana bagi Provinsi DKI Jakarta mengikuti Pilkada serentak yang berlangsung di seluruh Indonesia. Pilkada serentak bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pemborosan waktu dalam

pelaksanaan pemilu serta lebih menekankan kepada membuat pengeluaran anggaran dana yang digelontorkan oleh negara menjadi lebih efisien (Alma'arif & Kawuryan, 2021:77). Pelaksanaan pilkada serentak merupakan refleksi dari sebuah negara demokrasi karena pemilu adalah hal fundamental dalam menyelenggarakan prinsip-prinsip demokrasi (Fajrianto & Andriyansyah, 2024:189). Pesta demokrasi lima tahunan yang diadakan di seluruh provinsi di Indonesia ini menjadi simbol negara dalam menjunjung tinggi demokrasi (Perkasa, 2023:82).

Pentingnya pesta demokrasi ini tidak hanya tercermin dalam prosesnya, tetapi juga dalam hasil yang kerap menjadi cerminan situasi politik secara luas. Sebagai ibu kota negara dan pusat pemerintahan, hasil Pilkada DKI Jakarta sering kali dianggap sebagai indikator dinamika politik dalam skala nasional (Buntoro, 2017:33). Pesta politik ini semakin menobatkan DKI Jakarta sebagai pusat barometer perpolitikan Indonesia (Wicaksono, 2019:36). Dalam konteks Pilkada Jakarta 2024, perhatian publik tidak hanya tertuju pada kandidat yang maju dalam kontestasi, tetapi juga pada dinamika dukungan dari berbagai tokoh politik nasional, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Sebagai sosok yang memiliki pengaruh politik yang signifikan, sikap dan langkah-langkah Prabowo dalam konteks ini menjadi bahan perbincangan luas di masyarakat terlebih terkait dengan pengaruhnya dalam politik Indonesia.

Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia merupakan figur sentral dalam politik nasional. Kiprahnya di dunia politik mencakup berbagai peran strategis, mulai dari ketua partai politik hingga kandidat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden sejak 2009. Dalam kapasitasnya sebagai Presiden, keputusan dan tindakannya memiliki dampak yang luas baik secara politik maupun sosial. Oleh karena itu, keberpihakan Prabowo dalam pesta demokrasi bagi warga DKI Jakarta 2024 menjadi isu strategis yang mengundang perhatian masyarakat khususnya bagi rakyat Jakarta.

Keberpihakan seorang Presiden dalam kontestasi politik lokal seperti Pilkada DKI Jakarta 2024 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap dinamika politik di tingkat daerah dan nasional. Sebagai figur politik dengan mempunyai pengaruh besar, sikap politik Prabowo Subianto tidak hanya mencerminkan preferensi pribadinya tetapi juga berpotensi memengaruhi arah koalisi politik, strategi partai, dan persepsi publik terhadap pemerintahan. Pemilu level Pilkada

Jakarta memiliki posisi strategis dalam politik Indonesia, mengingat DKI Jakarta merupakan kawasan ibu kota negara yang menjadi barometer politik nasional. Penyelenggaraan pemilu di DKI Jakarta juga merupakan cerminan dari proses pemilihan umum yang berlangsung di tingkat nasional dan daerah (Sukri, 2022:88).

Di sisi lain, keputusan ini dapat memicu respons yang beragam dari masyarakat, media, dan kelompok politik lainnya. Dalam komunikasi politik, terdapat saluran atau media komunikasi yang mempunyai ciri khas *one to many communication* yang disebut dengan media massa (Khopipah, 2023:105). Media massa sebagai salah satu ruang utama dalam membentuk opini publik memainkan peran penting dalam menyampaikan dan membingkai informasi terkait keberpihakan Presiden Prabowo dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.

Sehingga analisis pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat memberikan ruang untuk memahami lebih dalam bagaimana hubungan antara politik, media, dan opini publik terbentuk dalam konteks demokrasi di Indonesia. Khususnya terkait bagaimana media massa mengkonstruksi suatu realitas peristiwa yang berpengaruh terhadap informasi bagi khalayak. Media mengumpulkan beragam realitas dari beragam peristiwa sehingga menjadi sebuah wacana yang merupakan hasil konstruksi dari sebuah realitas sosial (Hadiwijaya, 2023:77).

Media massa memiliki peran krusial dalam membentuk opini publik. Dalam aktifitas redaksinya, media massa juga dapat dikatakan sebagai lembaga penting dalam penyampaian dan pertukaran informasi dan menjadi sarana dalam kontrol sosial politik (Syarif & Bungin, 2021:37). Khususnya di era digital, media *online* yang menjadi subjek pada penelitian ini yakni Media Indonesia.com menjadi salah satu sumber informasi bagi masyarakat. Media ini memiliki audiens yang luas dan beragam, serta kecenderungan editorial yang dapat memengaruhi cara media dalam menyajikan berita. Analisis *framing* terhadap pemberitaan keberpihakan Prabowo dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 di Media Indonesia.com menjadi penting untuk melihat bagaimana narasi yang terbentuk dapat memengaruhi persepsi publik.

Dengan menggunakan pendekatan analisis *framing*, penelitian ini mengeksplorasi elemen-elemen berita, seperti pemilihan kata, penonjolan isu, dan sudut pandang editorial yang digunakan oleh media massa. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diidentifikasi *framing* yang

diterapkan pada pemberitaan yang terdapat di media massa tersebut serta implikasinya terhadap opini publik.

Latar belakang penelitian ini berakar pada pentingnya memahami hubungan antara politik dan media dalam demokrasi. Media tidak hanya bertindak sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor yang dapat memengaruhi arah diskursus publik. Kehadiran media di tengah situasi politik dapat melahirkan keseimbangan dalam *sharing* informasi dan aspirasi (Zamroni, 2022:49). Dalam konteks keberpihakan seorang presiden terhadap kandidat tertentu, media dapat memperkuat atau melemahkan legitimasi dukungan tersebut di mata masyarakat. Oleh karena itu, studi ini memiliki relevansi yang tinggi dalam mengeksplorasi interaksi antara politik, media, dan masyarakat dalam kontestasi politik di Indonesia.

Merujuk pada permasalahan yang telah diutarakan dalam latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana pembingkai berita keberpihakan Presiden Prabowo dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024 oleh Media Indonesia.com edisi September – November 2024?”

Selanjutnya penelitian terdahulu oleh (Mahameru et al., 2024:21) mengenai implikasi keberpihakan pejabat negara dalam mewujudkan keadilan pemilu di Indonesia menunjukkan keberpihakan pejabat negara dapat mempengaruhi pada integritas, transparansi, dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu. Pelanggaran netralitas pejabat negara juga mempengaruhi pada ketidakstabilan dan ketidakadilan politik yang berpeluang dalam menghambat momentum pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

(Sabir, 2023:39) dalam penelitiannya terkait dengan netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia menunjukkan netralitas dalam kaitannya dengan pemilu yaitu aparatur sipil negara hanya diperbolehkan untuk mengikuti proses ketika pemilihan berlangsung untuk menghindari adanya sikap memihak kepada salah satu kontestan yang bertarung dalam kontestasi pemilihan umum ini. Para aparatur sipil negara juga tidak diperkenankan untuk mengikuti prosesi menjelang pemilu seperti kampanye dan blusukan ke masyarakat.

Kemudian penelitian oleh (Kurniansyah et al., 2024:49) mengenai isu keberpihakan dalam pemilihan presiden 2024 dalam analisis *framing* berita makan malam Jokowi dan Prabowo di Tempo.co menunjukkan Tempo.co berupaya menjaga netralitas pemberitaan seimbang dengan memberitakan informasi secara proporsional dengan memuat pihak pro dan kontra dalam pemberitaan makan malam eksklusif antara Presiden Jokowi dengan Menhan Prabowo.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu yang terkait dalam penelitian ini, hingga kini belum ada yang meneliti keberpihakan Presiden Prabowo dalam kontestasi pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024 dalam perspektif *framing* berita di media massa. Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dengan mengacu pada kesenjangan penelitian yang terdapat di penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Merujuk pada hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pembingkai berita kontestasi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024 oleh Media Indonesia.com edisi September – November 2024 terkait dengan keberpihakan politik Presiden Prabowo Subianto.

METODE PENELITIAN

Menurut (Wahyuni, 2023:41) metodologi penelitian adalah berkaitan dengan pembacaan tindakan yang harus dilakukan dengan konteks tertentu dalam mencapai suatu tujuan. Dalam penelitian yang berjudul keberpihakan Presiden Prabowo dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2024 oleh Media Indonesia.com edisi September – November 2024, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang merupakan sebuah metode eksplorasi dalam memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial yang ada (Salam, 2023:3).

Sehingga fokus yang dikaji dalam penelitian ini yakni bagaimana Media Indonesia.com membingkai berita keberpihakan Presiden Prabowo dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2024 edisi September – November 2024 dengan menggunakan analisis *framing* Robert N Entman meliputi dua dimensi besar yakni seleksi isu dan penonjolan serta penekanan dalam aspek tertentu. Serta terdapat empat elemen *framing* yakni mendefinisikan persoalan, menentukan sumber penyebab masalah, membuat penilaian moral, dan menentukan solusi penyelesaian masalah (Sobur, 2018:186).

Peneliti memilih objek penelitian yang dikaji yakni berita Media Indonesia.com terkait keberpihakan Presiden Prabowo dalam kontestasi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024 edisi September – November 2024. Alasan peneliti mengambil berita di edisi tersebut yakni pada saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menetapkan dan mengesahkan tiga kontestan (kandidat cagub dan cawagub) bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Tentu saja untuk menuju ‘pertarungan’ dalam pemilihan ini, para kandidat berlomba merebut suara rakyat dan meraih dukungan dari para aktor politik tidak terkecuali dari dukungan Presiden Prabowo. Sehingga dari rentang September-November 2024, arah politik Presiden Prabowo terlihat dalam keberpihakan kandidat cagub dan cawagub DKI Jakarta yang didukungnya, terutama menjelang Pilkada serentak pada 27 November 2024.

Tabel 1 : Objek Penelitian Media Indonesia.com

No.	Judul Berita	Edisi	Jam Tayang
1.	Prabowo Minta Ridwan Kamil Jaga Kualitas Pilkada Jakarta	Senin, 16 September 2024	18:10 WIB
2.	Pramono Tanggapi RK Didukung Prabowo	Minggu, 10 November 2024	20:03 WIB
3.	Akhiri Polemik Surat Prabowo Dukung Ridwan Kamil	Selasa, 26 November 2024	15:15 WIB
4.	Prabowo Dukung RK-Suswono, Gerindra: Posisi Sebagai Ketum	Selasa, 26 November 2024	15:19 WIB
5.	Cak Imin Sebut Surat Dukungan Prabowo ke Ridwan Kamil Sah	Selasa, 26 November 2024	16:01 WIB
6.	Bawaslu RI Telusuri Surat Imbauan Prabowo Dukung Ridwan Kamil-Suswono	Rabu, 27 November 2024	11:42 WIB

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Empat Elemen *Framing* Media Indonesia.com

Dalam mengkaji sebuah permasalahan, terdapat empat elemen *framing* menurut Entman pertama yaitu menyoroti bagaimana seorang jurnalis dapat memahami sebuah realitas dan kemudian mengkonstruksi realitas tersebut menjadi sebuah bentuk informasi yang dibingkai dalam bentuk wacana berita. Elemen kedua yakni bagaimana sebuah permasalahan dapat dilihat dari penyebab yang melatarbelakangi adanya masalah tersebut. Kemudian berlanjut elemen keempat terkait dengan memberikan pernyataan atau tanggapan dari munculnya sebuah realitas permasalahan tersebut melalui pemberian nilai moral. Elemen keempat berkenaan pada

bagaimana media dapat menuliskan sebuah solusi atau jalan keluar dari sebuah permasalahan yang terdapat di dalam isi teks berita tersebut.

Berikut di bawah ini merupakan *framing* berita keberpihakan Presiden Prabowo dalam kontestasi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024 edisi September – November 2024 di Media Indonesia.com

Tabel 2
Judul: Prabowo Minta Ridwan Kamil Jaga Kualitas Pilkada Jakarta

Pendefinisian Masalah	Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan pesan kepada Ridwan Kamil – Suswono.
Memperkirakan Sumber Masalah	Pesan dari Prabowo kepada paslon gubernur 01 tersebut sarat akan dukungan secara berpihak.
Memberi Nilai Moral	Prabowo berpesan agar menang dengan cara yang baik.
Menekankan Penyelesaian Masalah	Penyelenggaraan pemilu di Jakarta bisa menjadi contoh bagi daerah lain.

Tabel 3
Judul: Pramono Tanggapi RK Didukung Prabowo

Pendefinisian Masalah	Klaim oleh kubu RK-Suswono yang menyatakan telah mendapat dukungan dari Prabowo ditanggapi oleh kandidat lain.
Memperkirakan Sumber Masalah	Dukungan Prabowo terhadap Ridwan Kamil menimbulkan reaksi dari kandidat Pramono-Rano.
Memberi Nilai Moral	Adanya dukungan sepihak dari Prabowo kepada RK tidak membuat Pramono menjadi tertekan.
Menekankan Penyelesaian Masalah	Pramono menanggapi secara santai terkait dukungan Prabowo terhadap RK dan percaya masih ada dukungan Allah.

Tabel 4
Judul: Akhiri Polemik Surat Prabowo Dukung Ridwan Kamil

Pendefinisian Masalah	Munculnya surat rekomendasi dari Presiden Prabowo kepada masyarakat Jakarta agar memilih RK menimbulkan kontroversi.
Memperkirakan Sumber Masalah	Perlunya ada pemisahan antara posisi sebagai ketum dan sebagai Presiden RI supaya tidak terjadi <i>bias</i> dukungan.
Memberi Nilai Moral	Surat yang ditandatangani Prabowo berpotensi sebagai pengerahan kekuatan dalam mendukung RK-Suswono menjelang pemilihan.

Menekankan Penyelesaian Masalah	Seharusnya Indonesia memiliki UU yang memisahkan antara jabatan presiden sebagai kepala negara dan ketua umum partai politik.
---------------------------------	---

Tabel 5

Judul: Prabowo Dukung RK-Suswono, Gerindra: Posisi Sebagai Ketum

Pendefinisian Masalah	Polemik terkait peredaran surat dukungan rekomendasi Prabowo kepada masyarakat Jakarta untuk memilih Ridwan Kamil – Suswono.
Memperkirakan Sumber Masalah	Masalah ini muncul dikarenakan distribusi ini dianggap melanggar aturan hukum kampanye.
Memberi Nilai Moral	Muzani membela Prabowo dengan menyatakan posisi sebagai ketum partai dan secara sah boleh mengeluarkan surat dukungan.
Menekankan Penyelesaian Masalah	Muzani menekankan surat tersebut diedarkan ke khalayak sebelum masa tenang sehingga tidak ada unsur kesengajaan pemilu.

Tabel 6

Judul: Cak Imin Sebut Surat Dukungan Prabowo ke Ridwan Kamil Sah

Pendefinisian Masalah	Cak Imin membingkai polemik surat dukungan Prabowo ini sebagai sebuah hal yang bukan menjadi persoalan.
Memperkirakan Sumber Masalah	Surat ditandatangani oleh Prabowo sebagai Presiden RI yang dapat mengubah pandangan dan kegaduhan di masyarakat.
Memberi Nilai Moral	Cak Imin menilai Prabowo mempunyai hak dalam mengutarakan dukungan politiknya di Pilgub DKI Jakarta 2024.
Menekankan Penyelesaian Masalah	Cak Imin menekankan tidak ada pelanggaran pemilu dalam munculnya surat dukungan Prabowo.

Tabel 7

Judul: Bawaslu RI Telusuri Surat Imbauan Prabowo Dukung Ridwan Kamil-Suswono

Pendefinisian Masalah	Bawaslu RI menindaklanjuti surat dukungan Prabowo kepada RK yang menimbulkan polemik.
Memperkirakan Sumber Masalah	Munculnya surat ini kepada publik diawali dengan adanya postingan foto di Instagram Raffi Ahmad yang memuat foto surat dukungan Prabowo terhadap Ridwan Kamil-Suswono.
Memberi Nilai Moral	Terdapat perbedaan komentar antara Bawaslu RI yang akan melakukan investigasi lebih lanjut dan Bawaslu DKI Jakarta yang menyatakan surat Prabowo bukan menjadi masalah.
Menekankan Penyelesaian Masalah	Bawaslu akan melakukan penelusuran lebih mendalam terkait surat dukungan Prabowo tersebut dan akan mengumumkan hasilnya.

Dua Dimensi Besar *Framing* Entman**b. Seleksi Isu dan Penekanan serta Penonjolan Aspek Media Indonesia.com**

Pada berita pertama Media Indonesia.com, redaksi melihat isu Prabowo yang menitipkan pesan kepada kandidat cagub dan cawagub DKI Jakarta yakni Ridwan Kamil (RK) dan Suswono (SW) agar dapat menciptakan suasana baik selama perhelatan kontestasi ini berlangsung. Penekanan yang ditampilkan dalam berita ini melihat pada isu degradasi moral dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Permasalahan moral ini, ditangkap oleh redaksi sebagai sebuah isu krusial karena salah satu kandidat cagub dan cawagub mendapatkan perlakuan khusus dari petinggi negara berkaitan dalam penyelenggaraan pemilu ini. Terlebih Jakarta merupakan wilayah ibu kota negara yang selalu menjadi barometer politik nasional membuat peristiwa yang terjadi di Jakarta menjadi sangat penting dan menjadi contoh bagi wilayah Indonesia yang lain.

Media Indonesia.com dalam berita kedua menyoroti reaksi dari Pramono Anung yang mendapatkan informasi bahwa saingannya di Pilgub DKI Jakarta 2024 yakni Ridwan Kamil (RK) meraih dukungan penuh dari Presiden Prabowo. Namun dukungan Prabowo terhadap RK, tidak membuat Pramono gentar dan menyerah. Pramono menyatakan akan tetap berjuang untuk memenangkan pemilihan gubernur ini dengan selalu beribadah dan berharap dukungan dari Allah SWT jauh lebih bermakna.

Penekanan informasi yang diutarakan oleh Pramono ihwal dirinya selalu berada dalam dukungan Allah SWT dinarasikan sebagai sesuatu yang lebih bernilai dan merefleksikan tingkat keagamaan dirinya yang yakin takdir yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Dapat diartikan dukungan Prabowo terhadap RK, bukanlah dukungan yang mendalam karena menurut Pramono perjuangan jauh lebih baik jika mempunyai nilai spiritual tinggi.

Kemudian pada berita ketiga, Media Indonesia.com melihat isu munculnya surat rekomendasi dukungan Prabowo yang menyatakan dukungannya terhadap RK dan SW menimbulkan kontroversi di masyarakat. Terdapat penekanan yang ditonjolkan dalam berita ini yaitu belum adanya hukum (regulasi) di Indonesia yang memisahkan antara peran presiden sebagai kepala negara dan peran ketua umum sebagai pemimpin partai politik. Dengan tidak

adanya aturan ini, memungkinkan terjadinya celah potensi konflik kepentingan politik akan terus terjadi selama belum dirumuskannya aturan hukum ini.

Hal lain yang ditonjolkan dalam berita ini adalah mengkritisi nilai dan tanggung jawab moral seorang Presiden RI khususnya Prabowo yang seharusnya dapat menunjukkan sikap kewarganegaraan dengan tidak mengkaitkan posisinya sebagai ketua umum dengan kepentingan pemilu. Namun kenyataannya seorang presiden yang diharapkan bisa selalu menjaga nilai netralitas dalam pesta demokrasi yang berlangsung selama lima tahun ini, justru menjadi tokoh yang tidak bisa memisahkan antara kapasitas dirinya sebagai kepala negara dan kuasanya sebagai seorang ketua umum atau pemimpin tertinggi dalam partai politik.

Selanjutnya, pada berita keempat Media Indonesia.com masih pada membahas isu yang sama yakni terkait dengan munculnya surat dukungan Prabowo kepada RK tetapi melihat pada dimensi aktor lain dengan menyoroti pernyataan dari Ahmad Muzani selaku Sekjen Partai Gerindra. Dalam berita ini menekankan pada pembelaan yang diungkapkan oleh Muzani dengan membela Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra.

Pembelaan tersebut dinarasikan dengan mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan oleh Prabowo dalam surat dukungannya kepada RK merupakan sebagai bagian tugas, pokok dan fungsi Prabowo sebagai ketum partai bukan sebagai Presiden RI. Hal ini menurut Muzani tidak ada salahnya dan wajar seorang ketum mengeluarkan surat dukungan terhadap salah satu kandidat dengan maksud surat tersebut bisa sampai kepada khalayak dan mendapatkan simpati dari rakyat.

Media Indonesia.com dalam berita kelimanya menyoroti isu yang sama yaitu surat dukungan Prabowo terhadap RK-SW. Tetapi pada berita ini, isu yang ditangkap oleh Media Indonesia.com dengan fokus pada pernyataan Muhaimin Iskandar atau *Cak Imin* selaku Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang turut berkomentar atas munculnya surat dukungan Prabowo tersebut.

Cak Imin menekankan surat dukungan Prabowo tidak perlu dipermasalahkan, sehingga mengurangi urgensi isu tersebut sebagai suatu hal yang kontroversial. Karena Prabowo juga punya hak dalam arah dukungan politiknya, meskipun Prabowo juga menjabat sebagai Presiden

RI yang sangat berpotensi memengaruhi opini publik. *Cak Imin* juga membingkai bahwa munculnya surat dukungan tersebut tidak melanggar aturan hukum terutama aturan dalam masa kampanye. Ia juga memperkuat narasi tindakan yang dilakukan oleh Prabowo adalah sah secara konstitusional hukum sehingga tidak perlu lagi ada perdebatan-perdebatan di masyarakat.

Terakhir, berita keenam Media Indonesia.com masih membahas isu yang sama yakni terkait munculnya surat dukungan Prabowo kepada RK tetapi melihat pada dimensi aktor lain dengan menyoroti pernyataan sikap Bawaslu RI selaku lembaga negara yang berwenang dalam memantau proses penyelenggaraan pemilu. Pada berita ini lebih menonjolkan peran dan tanggung jawab dari keseriusan Bawaslu untuk menyelesaikan polemik permasalahan ini secara tuntas dan tidak diskriminatif. Walaupun pada kenyataannya tetap saja ada terdapat perbedaan sikap antara perwakilan Bawaslu RI dan Bawaslu DKI Jakarta.

Dari sisi Bawaslu RI menyatakan pihaknya melakukan investigasi lebih lanjut dan mendalam terhadap munculnya surat dukungan Prabowo tersebut. Di sisi lain, Bawaslu DKI Jakarta cenderung untuk 'bermain aman' dalam polemik surat ini dengan menganggap munculnya surat dukungan tersebut bukan menjadi sebuah masalah yang melanggar sistem pemilu. Hal ini mengartikan bahwa terjadi perbedaan sikap antara pihak Bawaslu RI dan Bawaslu DKI Jakarta, sehingga sikap ketidakselarasan informasi ini menjadikan sebuah tantangan baru yang harus diselesaikan di dalam internal lembaga pemilu tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis *framing* berita keberpihakan Presiden Prabowo dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2024 edisi September – November 2024, menunjukkan terdapatnya bingkai berita dari Media Indonesia.com yang menjadi subjek dalam penelitian ini. *Media online* yang dimiliki Surya Paloh ini membingkai informasi pemberitaannya dengan menyajikan informasi yang netral dan berimbang dari dua sisi. Artinya Media Indonesia.com menempatkan berita dua sisi yakni pro dan kontra secara proporsional dan mendapatkan porsi pemberitaan yang sama.

Hal ini terlihat dari pemberitaan yang memuat reaksi Pramono Anung, peneliti Perludem, dan Bawaslu RI selaku pihak yang menentang keberpihakan Presiden Prabowo dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Sebaliknya dari sisi pro menampilkan informasi pernyataan dari Prabowo yang

berpesan kepada RK untuk menjaga situasi pemilu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, dan Ketum Partai PKB Muhaimin Iskandar yang turut menanggapi surat dukungan Prabowo terhadap RK bukanlah sebagai bentuk pelanggaran hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma'arif, & Kawuryan, M. W. (2021). Memikirkan Kembali Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2022: Antara Gubernur dan Pejabat Pelaksana. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 73–85. <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.10071>
- Buntoro, G. A. (2017). Analisis Sentimen Calon Gubernur DKI Jakarta 2017 Di Twitter. *Integer Journal*, 2(1), 32–41.
- Fajrianto, & Andriyansyah, M. F. (2024). Pilkada Serentak 2024 : Antara Pelanggaran Netralitas ASN dan Upaya Penanggulannya. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 5(3), 188–197.
- Hadiwijaya, A. S. (2023). Sintesa Teori Konstruksi Sosial Realitas Dan Konstruksi Sosial Media Massa. *Dialektika Komunika : Jurnal Kajian Komunikasi Dan Pembangunan Daerah*, 11(1), 75–89. <https://doi.org/10.33592/dk.v11i1.3498>
- Khopipah, S. (2023). Pengaturan Kampanye Di Media Sosial Pada Pemilu 2024 Dalam Perspektif Komunikasi Politik. *Jurnal Pengawasan Pemilu*, 8(3), 93–108.
- Kurniansyah, R. A., Mulyana, D., Siregar, R. K., & Harningsih. (2024). Isu Keberpihakan dalam Pemilihan Presiden 2024 (Analisis Framing Berita Makan Malam Jokowi dan Prabowo di Tempo.co). *Lugas : Jurnal Komunikasi*, 7(1), 39–50.
- Mahameru, D. E., Badjeber, M. H., Shakira, T. A., Sianturi, M. S., Rafif, A., & Wahyuningsih, Y. Y. (2024). Implikasi Keberpihakan Pejabat Negara Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan dan Kedamaian di Pemilu Indonesia. *Kultura : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(7), 15–23.
- Perkasa, A. W. A. P. (2023). Konflik Sosial dan Politik Identitas sebagai Kecacatan Demokrasi Indonesia: Studi Kasus Pilkada DKI Jakarta 2017. *Deviance : Jurnal Kriminologi*, 7(1), 81–100. <https://doi.org/10.36080/djk.2356>
- Sabir, M. S. (2023). Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum. *Al-Ahkam : Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(1), 26–40.
- Salam, A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Pasaman Barat: Azka Pustaka.
- Sobur, A. (2018). *Analisis Teks Media (Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Sukri, M. A. (2022). Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Jakarta 2017. *Jurnal Penyuluhan Agama (JPA)*, 9(1), 87–98.
- Syarif, N., & Bungin, B. (2021). *Citra Aktor Politik Dalam Framing Media Lokal*. Jakarta: Prenada.
- Wahyuni, S. (2023). *Riset Kualitatif Strategi dan Contoh Praktis*. Jakarta: Kompas.
- Wicaksono, A. (2019). Gubernur DKI Jakarta Dipilih Presiden: Sebuah Wacana yang Patut Dipertimbangkan. *Jurnal PolGov*, 1(1), 35–56. <https://doi.org/10.22146/polgov.v1i1.5050>
- Zamroni, M. (2022). *Relasi Kuasa Media Politik (Kontestasi Politik dalam Redaksi Berita Televisi)*. Jakarta: Kencana.